



# LKPI

LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

7A 2018



## KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH

KEBIJAKAN  
PEMERINTAHAN  
DAERAH

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua sehingga selesainya penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor pada Inspektorat Kota Bogor Tahun 2018 ini dengan lancar.

LKPJ Tahun 2018 ini akan dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor Tahun 2018 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Inspektorat Kota Bogor Tahun 2018 ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan gambaran organisasi Inspektorat Kota Bogor, kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Kota Bogor sepanjang tahun 2018.

Sejauh ini kami telah berusaha untuk melaksanakan semua tugas yang diemban pada Inspektorat Kota Bogor dengan sebaik-baiknya. Namun demikian kami pun menyadari sepenuhnya, bahwa tidak ada gading yang tak retak yang berarti pula bahwa akan selalu ada kemungkinan kami melakukan ketidaksengajaan atau bahkan melakukan kesalahan, sehingga tidak dapat memuaskan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bogor.

Demikian bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bogor Tahun 2018 pada Inspektorat Kota Bogor kami sampaikan. Harapan kami

agar laporan ini dapat ditelaah dan dikaji serta dikritisi secara proporsional. Dengan demikian, kami akan mendapatkan berbagai bahan masukan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Inspektorat Kota Bogor. Akhirnya, semoga semua aktivitas yang kita lakukan selama ini, menjadi amal ibadah dan kebaikan yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. Amin.

Bogor, Desember 2018  
Rabiul Awal 1440 H

PIH. INSPEKTUR KOTA BOGOR



**Arie Sarsono B, SE.M.Pd**  
Pembina Tingkat I – IV/b  
NIP. 19630408 198303 1 007

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. DASAR HUKUM .....	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
<b>BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	5
A. VISI DAN MISI .....	5
B. TUJUAN DAN SASARAN SERTA CARA MENCAPAINYA .....	6
<b>BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	9
PENGELOLAAN BELANJA INSPEKTORAT KOTA BOGOR .....	9
<b>BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	11
A. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN .....	11
B. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH .....	13
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	37

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Dasar Hukum*

**S**esuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Inspektorat Kota Bogor adalah salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengawasan yang berada dibawah Walikota dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Bogor ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bogor No. 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kota Bogor.



### *B. Gambaran Umum Organisasi*

Inspektorat Kota Bogor beralamat di Jl. Pahlawan Blk. 144 Kecamatan Bogor Selatan. Sampai dengan akhir Desember 2018 Inspektorat Kota Bogor memiliki 51 (lima puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Struktural, 31 (tiga puluh satu) orang Pejabat Fungsional Auditor, 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian, 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan 10 (sepuluh) orang Pelaksana.



#### **1. Kedudukan**

Kedudukan Inspektorat Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). bahwa Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat

Dewan, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Inspektorat Kota Bogor sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Kota Bogor merupakan unsur penunjang dibidang pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Inspektorat Kota Bogor adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Pengawasan Pemerintahan Daerah. dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. perumusan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;



- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Struktur Organisasi**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bogor, maka struktur organisasi Inspektorat Kota Bogor terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretaris :
  - 1) Sub Bagian Administrasi dan Umum
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Irban Bidang Keuangan
- d. Irban Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- e. Irban Bidang Pemerintahan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB II

# KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

### A. Visi dan Misi

Untuk mendorong terwujudnya Visi Kota Bogor : “Kota perdagangan dengan Sumber Daya Manusia produktif dan pelayanan prima“, maka Inspektorat Kota Bogor sebagai unit teknis dibidang pengawasan menetapkan visi Inspektorat Kota Bogor dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, yaitu:

***“Menjadi Katalisator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Transparan.”***

Makna dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

#### 1. Katalisator

Makna dari katalisator adalah terjadinya sesuatu perubahan, mempercepat dalam suatu proses,

#### 2. Transparan

Makna dari kata Transparan adalah terbuka dan mudah di akses dengan mudah. Visi Inspektorat Kota Bogor sesuai dengan fungsinya dalam bidang pengawasan akan menjadi motivator untuk dapat melakukan perubahan dan percepatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam menjalankan kebijakan, program dan systemnya dapat diakses informasi aktualnya dengan mudah oleh masyarakat

Dalam rangka mencapai visi tersebut, kita harus mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, adapun **Misi** Inspektorat Kota Bogor Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan Efektif
- 2) Meningkatkan Kapasitas APIP yang kompeten dan profesional.

**Tujuan** yang akan dicapai Inspektorat Kota Bogor untuk lima tahun ke depan adalah Meningkatnya kinerja keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Sedangkan **Sasaran** yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas SPIP dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

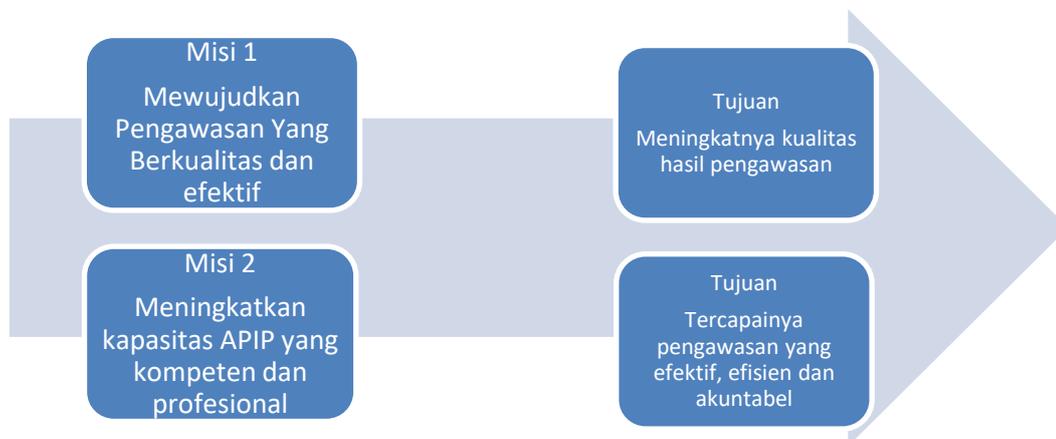
Sementara itu **Kebijakan** yang ditetapkan Inspektorat Kota Bogor sesuai dalam rencana strategis adalah Tersusunnya sistem pengawasan yang terarah dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang telah ditetapkan.

## B. Tujuan dan Sasaran serta Cara Mencapainya

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam merealisasikan misi.

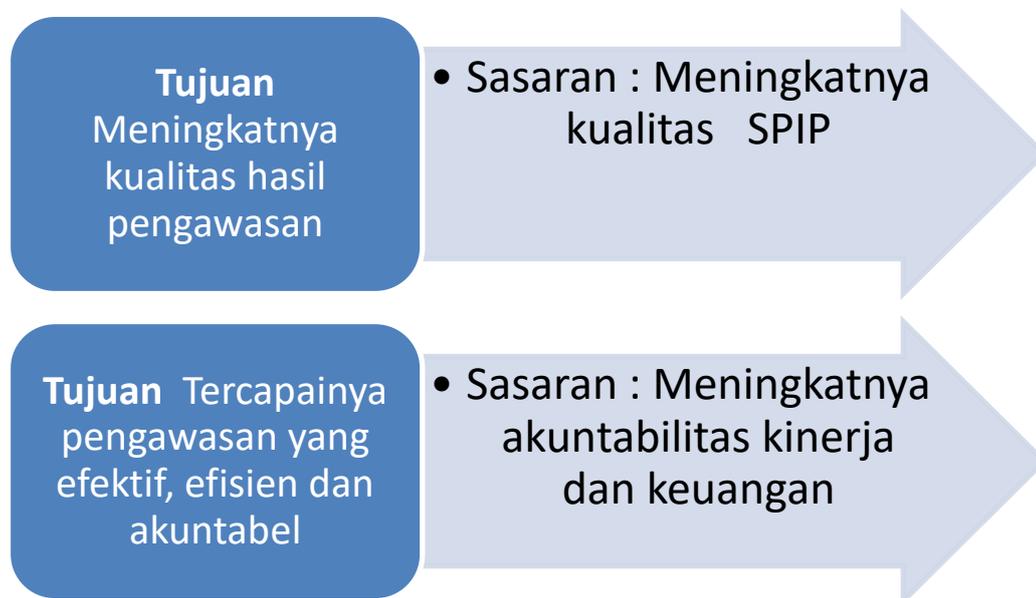
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Inspektorat Kota Bogor berdasarkan misi yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Misi dan Tujuan

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



Gambar 2 : Tujuan dan Sasaran

Pada masing-masing sasaran terdapat indikator untuk mengukur sasaran yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran pertama : Meningkatkan kualitas SPIP, dengan indikator kinerja sasaran :

- a. Level maturitas SPIP
- b. Jumlah PD yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Sasaran kedua : Meningkatkan Kualitas APIP yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja sasaran :

- a. Tingkat/Level kapabilitas APIP.
- b. Nilai SAKIP Inspektorat.
- c. Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah yang memenuhi kriteria CC ke atas (%).
- d. Opini BPK atas LKPD Kota Bogor.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka dibutuhkan kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan yang dipedomani dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Hal-hal penting yang harus disiapkan dalam membuat kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan. Serangkaian kebijakan ditetapkan sebagai petunjuk bagi seluruh jajaran staf Inspektorat Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

Kebijakan yang ditetapkan adalah :

***“Tersusunnya Sistem Pengawasan yang terarah dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang telah ditetapkan.”***

## BAB III

# KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN

## KEUANGAN

### Pengelolaan Belanja Inspektorat Kota Bogor

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2018. Inspektorat Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2018 memperoleh anggaran sebesar Rp15.000.665.958,- (*Lima Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) dengan realisasi sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebesar Rp14.036.420.607,- (*Empat Belas Milyar Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah*) atau sebesar 93,57%. Rincian Anggaran Inspektorat Kota Bogor Tahun 2018 per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	TOTAL ANGGARAN 2018	Realisasi				
			Target S/d Des 2018		Realisasi S/d Des 2018		Sisa
			Rp	%	Rp	%	Rp
	A	B	C	D	E	F	G = C - G
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>						
1	Gaji PNS dan Tunjangan	11.399.830.958,00	11.399.830.958,00	100,00 %	11.061.307.863	97,03 %	338.523.095,00
	<b>TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>11.399.830.958,00</b>	<b>11.399.830.958,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>11.061.307.863</b>	<b>97,03 %</b>	<b>338.523.095,00</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						
	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>						
1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00 %	534.357.298,00	89,06 %	65.642.702,00
	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
1	Pengadaan Inventaris Kantor	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00 %	402.824.200,00	80,56 %	97.175.800,00
2	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00 %	241.375.570,00	96,55 %	8.624.430,00
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>						

1	Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan OPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00 %	28.735.400,00	57,47 %	21.264.600,00
2	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00 %	95.157.490,00	95,16 %	4.842.510,00
	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>						
1	Audit Operasional ( PKPT dan Non PKPT )	556.900.000,00	556.900.000,00	100,00 %	483.821.170,00	86,88 %	73.078.830,00
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)	227.770.000,00	227.770.000,00	100,00 %	159.439.537,00	70,00 %	68.330.463,00
3	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK - JFA)	196.700.000,00	196.700.000,00	100,00 %	185.442.094,00	94,28 %	11.257.906,00
4	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00 %	119.508.525,00	79,67 %	30.491.475,00
5	Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan	147.840.000,00	147.840.000,00	100,00 %	103.471.538,00	69,99 %	44.368.462,00
6	Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a ke atas dan Verifikasi LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00 %	82.011.300,00	82,01 %	17.988.700,00
7	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00 %	253.316.408,00	84,44 %	46.683.592,00
8	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	137.175.000,00	137.175.000,00	100,00 %	91.468.468,00	66,68 %	45.706.532,00
9	Sapu Bersih Pungutan Liar	134.250.000,00	134.250.000,00	100,00 %	49.265.746,00	36,70 %	84.984.254,00
10	Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Banprop Jabar 2018)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00 %	144.918.000,00	96,61 %	5.082.000,00
	<b>TOTAL BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.600.635.000,00</b>	<b>3.600.635.000,00</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2.975.112.744,00</b>	<b>82,63 %</b>	<b>625.522.256,00</b>
	<b>TOTAL ANGGARAN 2018</b>	<b>15.000.465.958,00</b>	<b>15.000.465.958,00</b>	<b>100 %</b>	<b>14.036.420.607,00</b>	<b>93,57 %</b>	<b>964.045.351,00</b>

## **BAB IV**

# **PENYELENGGARAAN URUSAN**

## **PEMERINTAHAN DAERAH**

### **A. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pelaksanaan program ini didukung dengan kegiatan :

#### **1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD**

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan SKPD dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan dari bulan Januari sampai dengan Mei dan bulan September sampai dengan Desember 2018. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan dan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Bogor dengan keluaran berupa Buku Rencana Kerja Tahun 2019, Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018, Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018, Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018, Buku Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2018.

#### **2) Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bogor**

LKIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini digunakan untuk mengetahui kinerja PD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sehingga berdampak pada peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah karena adanya sistem pelaporan yang efektif.

Terkait dengan evaluasi LKIP PD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 97 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, maka Inspektorat Kota Bogor melaksanakan evaluasi Laporan Kinerja PD Tahun 2017, dengan hasil sebagai berikut : Evaluasi LKIP terhadap LKIP PD Tahun 2017 yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) PD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan 9 Juni 2018 selama 8 hari kerja, dengan Hasil evaluasi sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) PD mendapatkan nilai BB
2. 21 (dua puluh satu) PD mendapatkan B
3. 8 (delapan) PD mendapatkan nilai CC
4. 1 (satu) PD mendapatkan nilai C

Selain melakukan evaluasi, inspektorat Kota Bogor juga harus melakukan reviu terhadap LKIP Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017, sebagai persyaratan terhadap penilaian LKIP Pemerintah Kota Bogor oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu LKIP Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 28 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor agar melaksanakan evaluasi Renstra seluruh SKPD agar selaras dengan RPJMD 2015 – 2019 dan menetapkan hasilnya dengan Keputusan Walikota.

2. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor memproses penetapan Keputusan Walikota Bogor tentang :
  - a. Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD hasil evaluasi oleh Bappeda.
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme penyusunan dan penyampaian data/informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja.

#### **B. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**

Program ini memiliki peran dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka menengah Tahun 2012-2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah :

##### **1) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Reviu LKPD) Tahun 2016**



Foto *Penyerahan Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2017 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.*

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pelaksanaan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2017 dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2018, melalui :

- a. Reviu tingkat PD yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018,
- b. Reviu tingkat Kota yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 21 Maret 2018. Untuk LKPD Tahun 2017, Reviu LKPD tingkat Kota Bogor, menghasilkan rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Pemerintah Kota Bogor menetapkan target opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017 dengan Nomor : 31B/S-HP/XVIII.BDG/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018, Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Pencapaian kinerja ini merupakan pengulangan prestasi dari tahun 2017. Untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor telah dilaksanakan upaya-upaya yang dilaksanakan berdasarkan komitmen seluruh perangkat daerah antara lain:

- a. Dibentuknya bengkel WTP untuk memudahkan seluruh perangkat daerah utk berdiskusi dan berkonsultasi dalam pemecahan masalah terkait penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.
- b. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa
- c. Pembenahan penatausahaan aset
- d. Percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Berikut ini adalah kutipan surat terkait dengan Pemeberan Opini WTP oleh BPK Propinsi Jawa Barat:

**OPINI BPK  
2018**

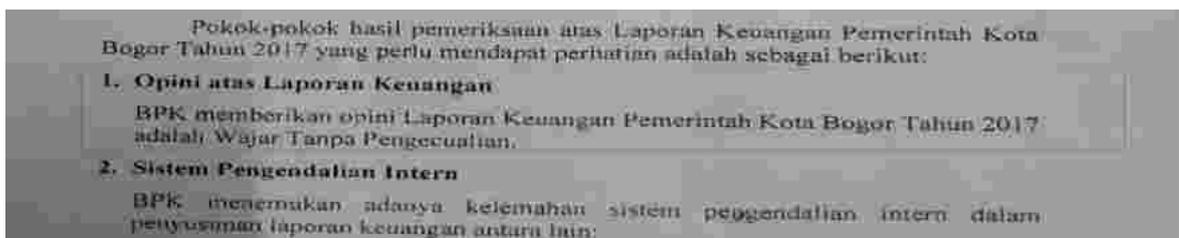
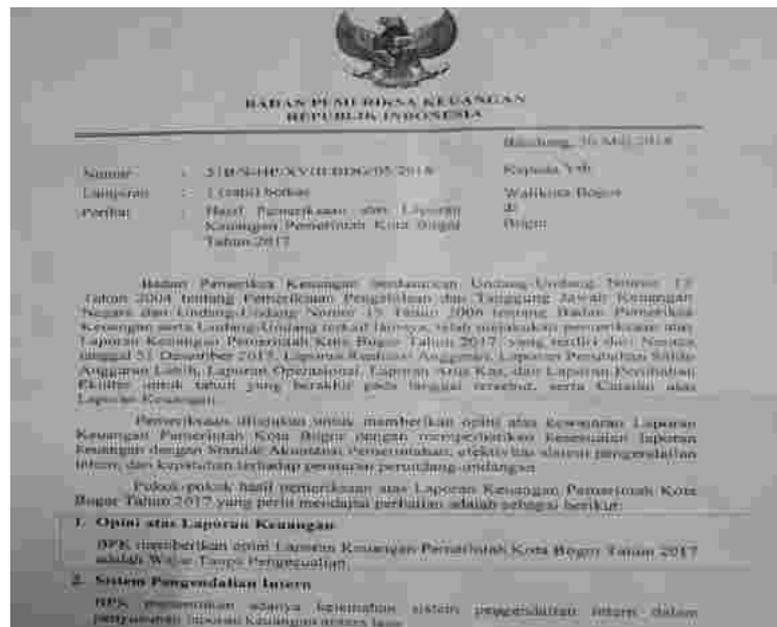
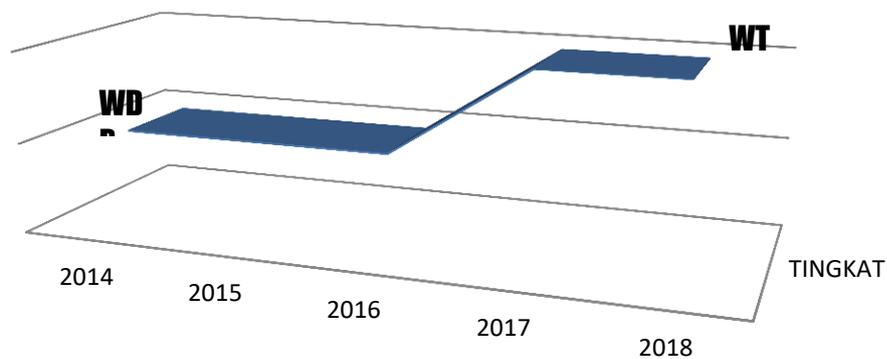


Foto Kutipan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2017.

Terkait dengan strategi pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor akan tetap melakkan upaya-upaya seperti tahun 2018. Upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan opini WTP tersebut. Berikut ini adalah grafik pencapaian Opini :

**GRAFIK PENCAPAIAN OPINI BPK**



	2014	2015	2016	2017	2018
■ TINGKAT	1	1	1	2	2
■ OPINI BPK	<b>WD</b>	<b>WD</b>	<b>WD</b>	<b>WT</b>	<b>WT</b>
	<b>P</b>	<b>-</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	<b>D</b>

**2) Pemutakhiran Data**

Kegiatan Pemutakhiran Data dilaksanakan selama satu tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk

menyelesaikan tindak lanjut temuan-temuan BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Inspektorat Provinsi Jawa Barat serta temuan-temuan Inspektorat Kota Bogor.

Pemutakhiran data temuan BPK semester I Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018, dengan hasil dari jumlah rekomendasi sebanyak 852 rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 851 rekomendasi, dan yang telah dinyatakan selesai sebanyak 776 rekomendasi, atau dengan capaian sebesar 91,07 %.



Foto. *Pemutakhiran Data temuan BPK semester I Tahun 2018 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.*



Foto. *Pemutakhiran Data temuan BPK semester II Tahun 2018 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.*

Pemutakhiran data temuan BPK semester II Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018, dengan hasil dari jumlah rekomendasi sebanyak 852 rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 852 rekomendasi, dan yang telah dinyatakan selesai sebanyak 810 rekomendasi, atau dengan capaian sebesar 95,07%.

Pada tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2018, bertempat di BKPP Wilayah IV Garut di laksanakan Pemutakhiran Data Tingkat Propinsi Jawa Barat dengan hasil: rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebanyak 98 temuan dan 164 rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 153 rekomendasi dan yang telah dinyatakan

selesai sebanyak 137 rekomendasi, atau dengan capaian sebesar 83,54%.



Terkait Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogor dari Jumlah Rekomendasi sebanyak 982 rekomendasi, seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100%.

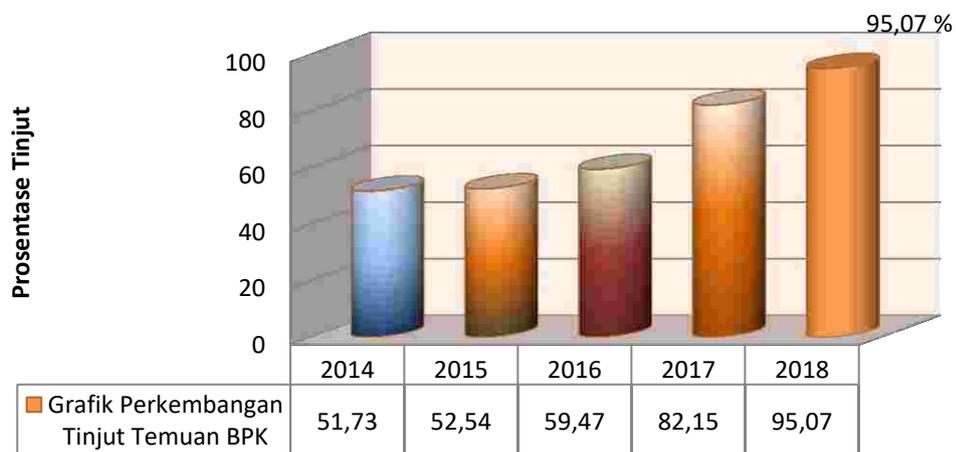
Rapat Pemutakhiran Data TLHP secara nasional bertempat di Hotel Grage Horison Kota Bengkulu pada Tanggal 8 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2018, dengan hasil pengumuman 5 (lima) Provinsi yang mendapatkan predikat memuaskan, 13 (tiga belas) Provinsi yang mendapatkan kategori baik, arahan Bapak Menteri Dalam Negeri dan penguatan APIP Selain penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan



Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah pada tanggal 12 sampai dengan 14 September 2018 di Hotel The Luxton Cirebon dengan tema Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Internal Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Penyampaian PKPT Tahun 2019.

Perkembangan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bogor dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

### Grafik Perkembangan Tinjau Temuan BPK



#### 4). Pembangunan Zona Integritas dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi, khususnya

dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (**WBK**) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (**WBBM**) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Terkait dengan Penetapan Perangkat Daerah Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inspektorat telah melakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (**WBK**) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (**WBBM**) Pemerintah Kota Bogor terhadap 5 (lima) Perangkat Daerah pada tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 6 Juli 2018 dengan hasil nilai sebagai berikut:

A. Rekapitulasi hasil survey eksternal untuk menilai Indeks Persepsi Korupsi :

No	Perangkat Daerah	Nilai Indeks Persepsi Korupsi (skala 4)	Jumlah Responden (orang)
1	RSUD Kota Bogor	3,34	75
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,65	76
3	Puskesmas Tanah Sareal	3,30	77
4	Badan Pendapatan Daerah	3,53	75
5	Dinas Penanaman /Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	3,20	75

B. Rekapitulasi hasil Penilaian akhir pada Lembar Kertas Evaluasi (LKE) Zona integritas (ZI) menuju WBK adalah :

No	Perangkat Daerah	Nilai Akhir
1	RSUD Kota Bogor	82,210
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,732
3	Puskesmas Tanah Sareal	81,185
4	Badan Pendapatan Daerah	78,977
5	Dinas Penanaman /Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	76,984

Dari kelima perangkat daerah yang dinilai tersebut terdapat 2 perangkat daerah yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB yaitu RSUD Kota Bogor dan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bogor.

Selain melaksanakan kegiatan tersebut diatas, Inspektorat Kota Bogor juga melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 pada tanggal 6 Februari 2018 sampai 20 Februari 2018 dan telah melaporkan hasilnya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Maksud dilakukan penilaian ini adalah untuk memberikan gambaran dan masukan kepada pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan PMPRB di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit adalah teknik "*criteria reference test*" dengan cara menilai setiap komponen dengan kriteria penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian di fokuskan pada 8 area perubahan yaitu :

1. Manajemen Perubahan (5)
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)
3. Penataan dan Penguatan Organisasi (6)
4. Penataan Tatalaksana (5)
5. Penataan Sistem Manajemen SDM (15)
6. Penguatan Akuntabilitas (6)
7. Penguatan Pengawasan (12)
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

**Tujuan reformasi birokrasi** adalah untuk menciptakan **birokrasi** pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.



Foto : Pengarahan dari Kemenpan RB  
terkait Penilaian PMPRB

Evaluasi PMPRB dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bogor bersama dengan tim pelaksana RB, dengan mengacu pada kriteria penilaian yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus atau kesepakatan antara Inspektorat Kota Bogor selaku tim Asesor PMRB dan tim pelaksana reformasi birokrasi

Penilaian dan penyimpulan hasil penilaian atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam melaksanakan program reformasi birokrasi sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kerja Evaluasi.
- b. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen, (ii) sub-komponen, dan (iii) kriteria.
  - 2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60%	a. Manajemen Perubahan (5%) b. Penataan Peraturan Perundang-undangan (5%) c. Penataan dan Penguatan Organisasi (6%)

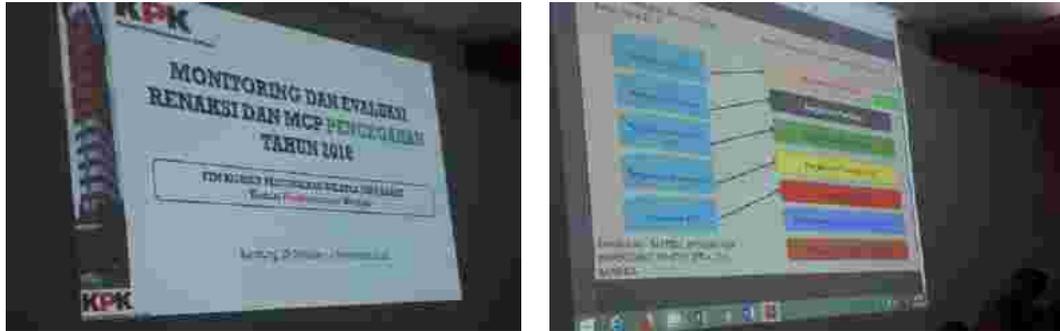
			d. Penataan Tatalaksana (5%) e. Penataan Sistem Manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan Pengawasan (12%) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6%)
2	Komponen Hasil	40%	a. Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20%) b. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10%) c. Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Nilai akhir pencapaian komponen pengungkit dan hasil pada PMRB Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 sebesar **60,92** dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Hasil PMPRB	
		Nilai	%
<b>Komponen Pengungkit/Proses</b>			
1	Manajemen Perubahan (5)	0,33	6,67 %
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan (5)	3,75	75,00 %
3	Penataan dan Penguatan Organisasi (6)	5,83	97,22 %
4	Penataan Tatalaksana (5)	4,09	81,70 %
5	Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	13,49	89,96 %
6	Penguatan Akuntabilitas (6)	3,32	55,27 %
7	Penguatan Pengawasan (12)	5,66	47,18 %
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6)	4,68	77,97 %
<b>Total Proses (60)</b>		41,15	68,59 %
<b>Komponen Hasil</b>			
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi (20)	8,74	43,71 %
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10)	3,00	30,0 %
3	Kualitas Pelayanan Publik (10)	8,03	80,25 %
<b>Total Hasil (40)</b>		19,76	49,42 %
<b>Indeks RB</b>		<b>60,92</b>	

k Rencana Aksi Pencegahan Korupsi sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran tidak hanya terkait upaya penindakan sebagaimana yang sering digaungkan oleh media. Lebih jauh, KPK juga memiliki tugas dan

wewenang lain yang tidak kalah pentingnya yaitu antara lain koordinasi, supervisi, monitoring serta pencegahan KORSUPGAH).



Sampai dengan tahun 2017, KPK telah menyelenggarakan kegiatan pendampingan Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) di 22 Provinsi termasuk Kota Bogor.

Tujuan utama dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan terciptanya tatakelola Pemerintahan Daerah yang baik dengan memperhatikan hal-hal seperti Sinkronisasi perencanaan di daerah visi misi pemerintah daerah; Menghindarkan intervensi dari pihak lain dalam penyusunan perencanaan; Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran; Mendelegasikan pelayanan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai filter pertama indikasi tindak korupsi; Mematuhi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan serta mengaktifkan unit pengendalian gratifikasi di tiap-tiap daerah.

Dengan demikian upaya memperbaiki tatakelola pemerintah diharapkan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Untuk Tahun 2018 telah dilaksanakan Pelaporan Korsupgah yang terintegrasi melalui Website Laman Korsupgah (<https://korsupgah.kpk.go.id/>) yang merupakan Monitoring Center Prevention (MCP) yang meliputi 8 (delapan) area intervensi dimana hasil penilaian selama Tahun 2018 Kota Bogor memperoleh Nilai 69% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan Penganggaran (APBD) **87%**
- 2) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) **49%**
- 3) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) **80%**
- 4) Kapabilitas APIP **52%**
- 5) Manajemen ASN **72%**
- 6) **Dana Desa**
- 7) Optimalisasi Pendapatan Daerah **78%**
- 8) Manajemen Aset Daerah **35%**

Khusus untuk **Dana Desa** Kota Bogor tidak melaksanakan Rencana Aksi karena tidak memiliki Desa. Adapun Nilai tersebut didasarkan pada pemenuhan kelengkapan dan bukti Fisik dari berbagai kebijakan terhadap kepatuhan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Daerah.

### **3) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-JFA)**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menilai daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dari Pejabat Fungsional Auditor (PFA) kemudian menjadi Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk masing-masing PFA. Unsur yang dinilai meliputi pendidikan, pengawasan, dan pengembangan profesi serta unsur penunjang lainnya. Hasil dari hal tersebut adalah terciptanya pejabat fungsional auditor yang handal dan memiliki kredibilitas yang tinggi dalam pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M-PAN /7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-708/K/JF/2009 Tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor, serta Keputusan Inspektur Kota Bogor Nomor 800/019 – Inspektorat tanggal 3 Januari 2018 dan Nomor 800/1001 – Inspektorat tanggal 1 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Pegawai Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Bogor dan Keputusan

Inspektur Kota Bogor Nomor: 800/018 -Inspektorat Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 dan 800/102 – Inspektorat tanggal 1 Agustus 2018 tentang pengangkatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor untuk periode Januari sampai dengan Juni 2017 kami telah melaksanakan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK-JFA) semester II Tahun 2017 (periode penilaian Januari s/d Juni 2017) sebanyak 24 orang JFA dan semester I Tahun Anggaran 2018 (periode penilaian Juli s/d Desember 2018) sebanyak 24 orang JFA, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dra. Siti Nuryani	19650727 199103 2 008	Auditor Madya	Semester II 2017 & Semester I 2018
2	Titik Supiati, SE	19600418 198701 2 001	Auditor Madya	Semester II 2017 & Semester I 2018
3	Ayi Suryaning Ati, SE	19700616 199612 2 001	Auditor Madya	Semester II 2017 & Semester I 2018
4	Aa Pardikusumah, SE	19660705 199703 1 005	Auditor Madya	Semester II 2017 & Semester I 2018
5	Eny Sadyantri, SH., MSi	19710607 199903 2 005	Auditor Madya	Semester II 2017 & Semester I 2018
6	Firdiani, SH., M.Si	19710122 199803 2 004	Auditor Madya	Semester II 2017 & Semester I 2018
7	Lilis Suliyanti, SE., M. Si	19760420 199803 2 003	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
8	Ade Hendar Purnawan, ST, MP	19690528 200501 1 003	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
9	E. Sulistiawarni, SE, Ak	19680809 199703 2 001	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
10	Siti Nurlaelah, SAP	19750327 199403 2 002	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018

11	Edi Kurniadi Kosasih, ST	19730422 200501 1 010	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
12	Budi Yulistiawan, ST	19760704 200604 1 011	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
13	Mahdalena, SE., M.Si	19821020 200604 2 006	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
14	Septi Ekariani, SE	19850901 200902 2 002	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
15	Makmur Ridho, ST	19750526 200902 1 001	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
16	Widiatmoko, ST, MM	19750316 201001 1 009	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
17	Dewi Lesmana, SE	19690706 199703 2 003	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
18	Dewi Ekaningsih , SE.	19750905 200604 2 016	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
19	Tri Suharto, SE.	19800716 201001 1 012	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
20	Rizki Satrianegara, SE.	19810918 201001 1 012	Auditor Muda	Semester II 2017 & Semester I 2018
21	Sarmudi, SE	19680123 199303 1 003	Auditor Pertama	Semester II 2017 & Semester I 2018
22	Ferawaty Sitorus, SE	19830807 201001 2 017	Auditor Pertama	Semester II 2017 & Semester I 2018
23	Areh Setiawati, SE	19780310 201001 2 011	Auditor Pertama	Semester II 2017 & Semester I 2018
24	Sisca Irma Trisiana, SE	19730919 200312 2 002	Auditor Pertama	Semester II 2017 & Semester I 2018

*Tabel 1 Pegawai Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Kota Bogor*

Untuk jabatan fungsional Auditor Kepegawaian, tim sekretariat penilai angka kredit melakukan koordinasi dengan BKN Pusat terkait penilaian angka kreditnya. Hal ini disebabkan karena Inspektorat Kota Bogor belum memiliki Tim penilai angka kredit untuk jabatan auditor kepegawaian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penilaian dilakukan langsung oleh

BKN Pusat sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 4 tahun 2013 tentang Ketentuan pelaksanaan permenpan RB nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dengan Angka Kreditnya.

Selain kegiatan tersebut, untuk meningkatkan kualitas APIP, setiap Pegawai yang telah menyelesaikan Diklat Substantif diharuskan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai lainnya dalam Praktek Kerja di Kantor Sendiri (PKS). Selama Tahun 2018, PKS yang dilaksanakan sebanyak 6 materi serta melakukan studi komparatif ke Inspektorat Kota Padang tanggal 25 sampai dengan 27 April 2018 dan Inspektorat kabupaten Sleman



#### **4) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Melalui Satuan Tugas**

Terkait dengan Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) , pada awal pencapaian Kapabilitas APIP Kota Bogor Tahun 2017 adalah level 3 dengan Catatan dan belum dilakukan telaah sejawat. Untuk peningkatan level kapabilitas, Inspektorat Kota Bogor melakukan Telaah sejawat berdasarkan arahan kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat mengenai peran dan Keaktifan BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam pendampingan dan asistensi terhadap Inspektorat Daerah pada rakor Inspektorat Daerah Kabupaten Kota Se-Jawa Barat yang bertempat di hotel Puri katulistiwa, Jatinangor sumedang tanggal 17 Januari 2018.

Hasil rakor disepakati tentang pembagian telaah sejawat yang dibagi berdasarkan letak wilayah yang di keluarkan dari BPKP perwakilan Jawa Barat. Dalam hal ini telaah sejawat Kota bogor yaitu inspektorat Kabupaten Bogor dan Inspektorat Depok, hasil penilaian telaah sejawat dijabarkan dalam skala nilai yaitu sangat baik 90% - 100%, Baik 70%-89%, Cukup Baik 50% - 69% dan Kurang Baik 0%-49%.

Inspektorat Kota bogor melakukan Inspektorat Kota Bogor Konsultasi dan Koordinasi terkait melakukan Koordinasi telaah peningkatan level kapabilitas ke BPKP sejawat dengan Inspektorat jawa Barat Pada tanggal 17 Oktober kabupaten Bogor dan Kota 2018 untuk dilakukan pendampingan Depok pada tanggal 20 penilaian kapabilitas APIP **Level 3** dan Maret 2018, Inspektorat Kota untuk mempersiapkan semua Bogor di telaah Sejawat oleh infrastruktur yang dibutuhkan.. Inspektorat Kota Depok pada



1 April 2018 dengan Hasil 91 dari 100 (**sangat baik**), Pendampingan dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propvinsi Jawa Barat tanggal 26 November sampai dengan 30 November 2018 dengan nilai Kapabilitas APIP tahun 2018 dengan Nilai 3 Dengan Catatan

Terkait dengan Level Maturitas SPIP , Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Inspektorat Kota Bogor mentargetkan Level Maturitas SPIP Tahun 2018 berada pada level 2 dengan tingkat kematangan berkembang. Tingkat kematangan Implementasi SPIP diukur dalam skala 0 hingga 5 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Inspektorat Kota Bogor mentargetkan Level Maturitas SPIP Tahun 2018 berada pada level 2 dengan tingkat kematangan berkembang. Tingkat kematangan Implementasi SPIP diukur dalam skala 0 hingga 5 dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Tingkat Maturitas	Interval Score
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ( $0 < \text{score}, 1,0$ )
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ( $1,0 \leq \text{skor} < 2,0$ )
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ( $2,0 \leq \text{skor} < 3,0$ )
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ( $3,0 \leq \text{skor} < 4,0$ )
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ( $4,0 \leq \text{skor} < 4,5$ )
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ( $4,5 \leq \text{skor} \leq 5$ )

Terkait dengan pencapaian target Level Maturitas SPIP pada Tahun 2018 berada pada level 2, dinyatakan belum tercapai. Hal ini disebabkan Pada Tahun 2018, proses Quality Assurance terhadap Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor belum dilakukan oleh BPKP Pusat. Sehingga Hasil dari level Maturitas SPIP masih berada pada level 1 (Rintisan). Namun Tahun 2018 Inspektorat Kota Bogor melakukan penilaian dan survey maturitas secara sampling terhadap 18 Perangkat daerah, yang selanjutnya dilakukan reuiu hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa barat. Hasil reuiu tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Reuiu atas Penilaian Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Bogor dengan Nomor LHR-831/PW10/3/2018. Tujuan dari Reuiu tersebut adalah untuk memberikan penjaminan atas penilaian maturitas SPIP pada Kota Bogor oleh Tim (Assesor) bahwa telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Hasil reviu Penilaian Maturitas SPIP sebagai berikut:

1. Kesesuaian terhadap pedoman dilaksanakan oleh Tim Asesor memperoleh nilai 85,37% atau sesuai pedoman Penilaian Maturitas SPIP.
2. Skor Penilaian SPIP, pelaksanaan tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kota Bogor merupakan penilaian reassesment dengan skor penilaian pendahuluan mencapai 3,8136, skor penilaian reassesment 3,3182 dan skor menurut hasil reviu adalah 3,1205

Hasil Reviu Penilaian Maturitas SPIP sebagai berikut:

Unsur	Sub Unsur	Bobot	Skor menurut Assessor	Skor menurut Reviu
1	2	3	4	5
<b>Lingkungan Pengendalian</b>		30%	3,500	3,250
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika		3	3
	Komitmen Terhadap Kompetensi		3	3
	Kepemimpinan yang Kondusif		4	3
	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan		4	4
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		3	4
	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM		3	3
	Perwujudan Peran APIP yang Efektif		4	3
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait		4	3
<b>Penilaian Risiko</b>		20%	3,000	3,000
	Identifikasi Risiko		3	3
	Analisis Risiko		3	3
<b>Kegiatan Pengendalian</b>		25%	3,2727	3,1818
	Reviu Kinerja		4	3
	Pembinaan Sumber Daya Manusia		3	3
	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi		3	3
	Pengendalian Fisik atas Aset		4	3
	Penetapan dan Reviu Indikator		3	3
	Pemisahan Fungsi		4	4
	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting		3	3
	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu		3	3
	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan		3	4
	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya		3	3
	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting		3	3
<b>Informasi &amp; Komunikasi</b>		10%	4,000	3,000
	Informasi		4	3
	Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif		4	3
<b>Pemantauan</b>		15%	3,000	3,000
	Pemantauan Berkelanjutan		3	3
	Evaluasi Terpisah		3	3
			<b>Menurut Assessor</b>	<b>Menurut Reviu</b>
	<b>Skor SPIP</b>		<b>3,3182</b>	<b>3,1205</b>

Atas hasil reuiu yang belum mencapai 100 % dan adanya perbedaan skor maturitas SPIP antara tim Reuiu dan Assesor, maka Tim reuiu menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada periode berikutnya menambah jumlah PD yang disampling dengan memperhitungkan minimal 40% anggaran satker dibandingkan total anggaran dan jumlah satker yang disampling minimal 30% dibandingkan total satker.
2. Mengadakan diklat penilaian maturitas SPIP khusus personil Assesor dan Diklat SPIP untuk personil *counterpart*
3. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan serta implementasi terkait sub unsur kepemimpinan yang kondusif, perwujudan peran APIP yang efektif, Hubungan Kerja yang baik dengan instansi terkait Reuiu Kinerja, Pengendalian Fisik Aset, Informasi yang relevan, serta komunikasi yang efektif yang didokumentasikan dengan baik.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Melakukan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan SPIP kepada seluruh perangkat daerah

#### **MATURITAS SPIP**

Acara	:	Sosialisasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pencapaian Level 3 di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
Pelaksanaan	:	13 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2018
Tempat	:	Padjadjaran Suites Resort and Convention Hotel Bogor
Jumlah Peserta	:	106 orang, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota</li> <li>- Wakil Walikota</li> <li>- Sekda</li> <li>- Sekretaris DPRD</li> <li>- Kepala Dinas</li> <li>- Sekretaris Dinas</li> <li>- Camat</li> <li>- Sekretaris Camat</li> <li>- Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas</li> <li>- Direktur RSUD</li> <li>- Wakil Direktur RSUD</li> </ul>



- 2) Menambah Jumlah PD yang disampling untuk penilaian maturitas SPIP
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terkait penyelenggaraan maturitas SPIP
- 4) Membangun sistem pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- 5) Melakukan penilaian Risiko terhadap seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

## 2) PENILAIAN RISIKO

Acara	:	Focus Group Discussion Penilaian Risiko
Pelaksanaan	:	21 September 2018
Tempat	:	Hotel Permata Bogor
Jumlah Peserta	:	90 orang, terdiri dari : - Satgas SPIP masing – masing 5 (lima) orang dari 18 Perangkat Daerah



- 6) melaksanakan Pembinaan terkait SPIP pada 18 Perangkat Daerah pada tanggal 20 Agustus sampai dengan 03 September 2018.
  - 7) Melaksanakan penyiapan Infrastruktur dan dokumen terkait Maturitas SPIP pada tanggal 06 sampai dengan 28 September 2018
  - 8) Melaksanakan monitoring pengumpulan dokumen terkait Penilaian Maturitas SPIP pada 18 Perangkat Daerah pada tanggal 17 September sampai dengan 28 September 2018
  - 9) FGD Penilaian Risiko 19 Perangkat Daerah pada tanggal 7 November 2018
  - 10) Pendampingan tim penilai BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam penilaian Maturitas SPIP Kota Bogor Pada tanggal 1 November 2018 sampai 9 November 2018
- 5) Pengelolaan LP2P PNS Gol.III/a ke atas dan Verifikasi LHKASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor**

Kegiatan Pengelolaan LP2P PNS Gol.III/a ke atas tidak dilakukan mulai tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang

Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongpraajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang serta Bidang Perekonomian Tahap I.

Sedangkan untuk verifikasi LHKASN dilakukan kepada seluruh eselon V sampai dengan III yang mengalami perubahan terkait dengan mutasi jabatan. Jumlah yang wajib melaporkan kekayaannya (terjadi perubahan/alih tugas, Promosi, mutasi) sebanyak 924 orang dan yang sudah melaporkan sebanyak 916 orang atau sekitar 99,13 %. Terkait dengan pengawasan dan pengendalian, pengelolaan LHKASN hal itu dilakukan oleh Inspektorat Kota Bogor. Terdapat sanksi yang jelas bagi ASN yang tidak menyampaikan LHKASN yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa peninjauan kembali dalam jabatan struktural maupun fungsional serta dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Semua data-data dijamin kerahasiannya, jika Inspektorat Kota Bogor membocorkan informasi tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selain itu dilakukan Sosialisasi Sistem Informasi Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SiHarka) yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2018, bertempat di D'Anaya hotel, peserta berjumlah 85 orang yang berasal dari seluruh Kasubag Umum dan kepegawaian Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.



Foto: Sosialisasi SiHarka

## 6) Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)

### a) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 700.45-30 Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 dengan tujuan pelaksanaan pengawasan akan lebih berdaya guna serta menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan yang dilaksanakan dalam Audit Operasional sebagai berikut :

1. Pemeriksaan yang dilaksanakan terdiri dari :

**a) Pemeriksaan reguler terdapat 19 PD yaitu:**

- Satuan Polisi Pamong Praja
- Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sekretariat DPRD
- Dinas Perumahan dan Permukiman
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Pendidikan
- Dinas Kesehatan
- Sekretariat Daerah

Pemeriksaan reguler dilaksanakan terhadap 4 (empat) aspek yaitu tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM dan metode kerja, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah.



Foto. *Permeriksaan Fisik pelaksanaan Pekerjaan dalam rangka pemeriksaan reguler*

#### **b) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu**

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan pada beberapa hal yang dianggap memiliki resiko tinggi dan berpotensi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pada pelaksanaan kegiatan tersebut. Pemeriksaan tersebut terkait dengan :

- Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
- JKN pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
- Barang dan Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Kota Bogor
- Bangun Guna Serah (BGS) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
- Pemeriksaan khusus sebanyak 18 kasus.

#### **c) Pemeriksaan Kinerja**

Pemeriksaan Kinerja dilakukan bertujuan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan. Dalam menilai aspek efektivitas, **pemeriksaan kinerja** bertujuan mengukur sejauh mana suatu program/kegiatan mencapai **tujuannya**.

Pemeriksaan Kinerja dilakukan terhadap:

- Dinas Pertanian Kota Bogor
- Dinas Perhubungan Kota Bogor
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
- Dinas Sosial Kota Bogor
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor

**d) Reviu Perencanaan dan Penganggaran**

Reviu Perencanaan dan Penganggaran dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai Quality Assurance. Walikota harus menugaskan APIP untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran. Reviu ini terdiri dari:

- Reviu Renja dilaksanakan pada 2 April 2018 sampai dengan 6 April 2018
- Reviu RKPD dilaksanakan pada 28 – 29 Juni 2018 dan 2 - 6 Juli 2018.
- Reviu RKA 2019 dilaksanakan pada tanggal 21 November 2018 sampai dengan 27 November 2018.
- Reviu KUA dan PPAS dilaksanakan pada tanggal 4 – 12 Oktober 2018 dan 15 - 19 Oktober 2018.

**e) Monitoring**

- 1) Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan untuk mengawasi proses penerimaan siswa baru melalui jalur prestasi dan warga miskin. Monitoring PPDB dilaksanakan tanggal 25 – 26 Juni 2018 dan 2 – 4 Juli 2018 pada 19 SMPN dan 24 SDN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor
- 2) Monitoring Penghapusan Aset dilaksanakan tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 3 Agustus 2018 pada 37 PD.
- 3) Monitoring Penyelenggaraan Dana BOS tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan 16 Oktober 2018 pada 14 SDN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

- 4) Monitoring Dana Alokasi Khusus pada tanggal 1 November 2018 sampai dengan 21 November 2018 pada 5 (lima) PD.
- 5) Monitoring Persediaan dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan mentikberatkan pada perhitungan persediaan sebagai bahan laporan keuangan, yang dilakukan pada tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 pada 6 (enam) PD.

**f) Verifikasi**

Verifikasi LPPD dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Mei 2018, 21 – 22 Juni 2018, 27 – 29 Juni 2018, 5 – 6 Juli 2018 terhadap 37 dokumen.

**g) Penyusunan SOP**

Penyusunan SOP bertujuan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penyusunan SOP dilaksanakan tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan 16 Februari 2018 sebanyak 16 SOP, terdiri dari :

- |  |  |
|--|--|
| ▪ Identifikasi Risiko  | ▪ Evaluasi Sistem  |
| ▪ Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Risiko                              | ▪ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah     |
| ▪ Telaah Sejawat   | ▪ Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Bogor |
| ▪ Peer Review Lintas Irban dan Lintas Pengendali Teknis.                           | ▪ Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI               |
| ▪ Gelar Pengawasan   | ▪ Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil                                  |
| ▪ Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Secara Mandiri (PPSDA Mandiri) |  |
| ▪ Penyelenggaraan  |  |

- |  |  |
|--|--|
| Bimbingan Teknis (Bimtek)  | Pemeriksaan Inspektorat  |
| ▪ Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan                          | Provinsi Jawa Barat  |
| ▪ Verifikasi Dokumen Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor | ▪ Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah |
| ▪ Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor                    | ▪ Reviu Perencanaan dan Penganggaran   |

#### **h) Pembinaan**

Pembinaan terhadap PD terkait dengan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban serta Maturitas SPIP. Pembinaan tersebut dilakukan pada :

- Pembinaan terkait Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban pada : Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Dinas Pertanian Kota Bogor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Tengah, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor.
- Pembinaan terkait Maturitas SPIP pada : BPKAD, DPMPTSP, DPUPR, Satpol PP, DLH, BKPSDA, Dinkes, RSUD, Diskominfo, Bapenda, Disperumkim, Disdik, Disdukcapil, Disparbud, Dishub dan Setda.

#### **7) Penguatan Pengawasan Pembangunan di kabupaten/Kota (Banprov 2018)**

Penguatan Pengawasan Pembangunan di kabupaten/Kota (Banprov 2018) diberikan oleh Provinsi Jawa Barat dengan tujuan dalam rangka sinergitas pengawasan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Bogor secara berkelanjutan serta peningkatan level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) sesuai Rencana Pembangunan Daerah Nasional 2014-2019 dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi.

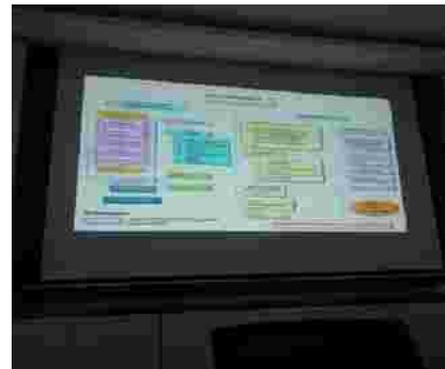
Bantuan Provinsi ini digunakan untuk Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2011, 2012, 2014 dan 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2018 sampai 16 Agustus 2018, dengan sasaran yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
2. Dinas Pendidikan Kota Bogor
3. Dinas Kesehatan Kota Bogor
4. Dinas Pertanian Kota Bogor
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
7. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
8. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
9. Bagian Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Kota Bogor
10. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

Terkait dengan Monitoring Pembangunan Fisik dan penyerapan anggaran atas Dana bantuan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2018 sampai 5 Oktober 2018 terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, Bagian Administrasi Pembangunan dan PBJ Setda Kota Bogor, Dinas Kesehatan Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dan Dinas Pertanian Kota Bogor.



Dalam rangka Peningkatan Kualitas APIP, Inspektorat Kota Bogor melakukan studi komparatif ke Inspektorat Kota Surabaya pada tanggal 11 Desember 2018 sampai 13 Desember 2018 untuk mendapatkan gambaran langkah-langkah yang harus ditempuh untuk peningkatan level SPIP dan Maturitas.



Sedangkan dalam rangka penilaian kapabilitas APIP menuju level 3 (Integrated), Inspektorat Kota Bogor telah divalidasi oleh BPKP Pusat yang artinya Inspektorat Kota Bogor mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.



Foto : Peningkatan Kapabilitas APIP

## 8) Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman serta kompetensi lain yang dibutuhkan APIP untuk melaksanakan tanggung jawabnya melalui bimbingan teknis. Bimbingan teknis tersebut yang disampaikan oleh narasumber dari Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Bimbingan teknis dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang diikuti oleh seluruh pegawai di Lingkungan Inspektorat Kota Bogor dengan materi :

1. Analisis Pemecahan Masalah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018 sampai 24 April 2018, bertempat di Hotel Grand Savero Bogor.
2. Reviu RPJMD, dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 sampai 14 September 2018, bertempat di D'Anaya Hotel Bogor.
3. Audit Kinerja bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pada tanggal 29 Oktober 2018 sampai 30 Oktober 2018, bertempat di Hotel Sahira Bogor.



Foto. *Bimbingan Teknis Analisis Pemecahan Masalah, bertempat di Grand Savero Hotel Bogor*



Foto. *Bimbingan Teknis Reviu RPJMD, bertempat di D'Anaya Hotel Bogor*



Foto. *Bimbingan Teknis Audit Kinerja bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, bertempat di Hotel Sahira Bogo*

## 9) Sapu Bersih Pungutan Liar

Unit Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bogor dalam hal ini Inspektorat Kota Bogor bersama-sama Kejaksaan Negeri Bogor dan Polresta Bogor Kota selama Tahun 2018 melakukan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 19 November 2018 yang bertempat di Hotel Sahira Bogor dengan peserta sosialisasi yang terdiri atas 11 Instansi diluar Pemkot, 3 Rumah Sakit, 4 BUMD dan 6 Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.



Sosialisasi Saber Pungli,  
bertempat *Hotel Sahira  
Bogor*

Lanjut Hasil Vicon Saber yang bertempat di Inspektorat Kota Bogor pada tanggal 7 Maret 2018.



Selain itu, juga dilakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak

## BAB V

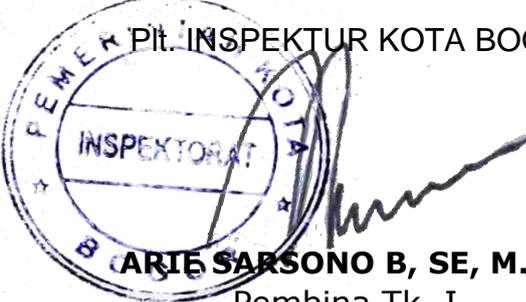
### PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bogor merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Inspektorat Kota Bogor yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kota Bogor berkewajiban untuk menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bogor khusus dalam lingkup Inspektorat Kota Bogor.

Laporan ini merupakan uraian pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bogor selama tahun 2018. Akhirnya semoga Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pijakan bagi penyusunan perencanaan serta peningkatan pelaksanaan tugas bagi Inspektorat Khususnya dan Pemerintah Kota Bogor pada umumnya.

Bogor, Desember 2018  
Rabiul Akhir 1440 H

Plt. INSPEKTUR KOTA BOGOR  
  
**ARIE SARSONO B, SE, M.Pd**  
Pembina Tk. I

NIP. 19630408 198303 1 007

**2 Jumlah pegawai,kualifikasi pendidikan,pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI	KET
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	TAHUN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Dra. Hj. Ira Sulistyanti, M.M. Jakarta, 04-04-1962	'196204041992112001	IV/b	01/04/2013	Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Pembangunan dan	01/01/2017	25	1	Diklat Kepemimpinan Tk.III	01/01/2001	285	IMMI Jakarta	2005	S2	55		
2	Lilis Lisnawati, S.H. Bandung, 05-05-1964	'196405051994032005	IV/b	01/04/2013	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan	01/01/2017	23	10	Diklat Kepemimpinan Tk.III	23/05/2011	360	Universitas Islam Nusantara	1991	S1	53		
3	Dra. Siti Nuryani Ujung Pandang , 27-07-1965	'196507271991032008	IV/b	01/04/2013	Auditor	01/04/2013	26	10		-	0	STIA (YAPPI) UJUNG PANDANG	1988	S1	52		
4	Arie Sarsono Budiraharjo, S.E., M.Pd. Bandung, 08-04-1963	'196304081983031007	IV/b	01/04/2015	Sekretaris Inspektorat Kota Bogor	21/07/2017	34	10	Diklat Kepemimpinan Tk.III	01/10/2012	360	UNJ	2003	S2	54		
5	Titik Supiati, SE Surabaya , 18-04-1960	'196004181987012001	IV/b	01/04/2017	Auditor	01/04/2017	33	12	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	07/01/2008	285	STIE GOTONGROYONG	2005	S1	57		
6	Ayi Suryaning Ati, S.E. Tasikmalaya , 16-06-1970	'197006161996122001	IV/b	01/10/2017	Auditor	01/10/2017	21	0	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	07/01/2008	285	Universitas Jenderal Soedirman	1993	S1	47		
7	Aa Pardikusumah, S.E. Sumedang , 05-07-1966	'196607051997031005	IV/a	01/04/2014	Auditor	01/04/2014	20	10	DIKLAT PIM TK IV	09/04/2002	285	Univ. Pasundan Bandung	1993	S1	51		
8	Drs. Dwi Raharjo Jakarta, 26-06-1966	'196606261993031007	IV/a	01/10/2014	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat	01/01/2017	24	10	Diklat Kepemimpinan Tk.III	11/04/2017	857	UNAS	1992	S1	51		
9	Raden Herry Suherman Suryana, S.H., M.Si Sumedang, 10-09-1965	'196509101985031009	IV/a	01/10/2014	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	01/01/2015	32	11	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	09/01/2002	285	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia (STIAM)	2013	S2	52		
10	Eny Sadyantri, S.H , M.Si Purbalingga, 07-06-1971	'197106071999032005	IV/a	01/04/2015	Auditor	01/04/2015	18	10	Diklat Kepemimpinan Tk.III	07/01/2005	360	Lainnya	2012	S2	46		
11	Firdiani, S.H., M.Si Bengkalis, 22-01-1971	'197101221998032004	IV/a	01/10/2017	Auditor	01/10/2017	19	10	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	07/01/2002	285	Universitas Nusa Bangsa	2013	S2	46		
12	Tonina Gunawan, S.T. Bandung, 12-11-1966	'196611121994031006	III/d	01/04/2012	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	01/01/2015	21	10	ADUM	09/01/2002	250	Universitas Lang lang buana	1998	S1	51		
13	Hilman Haerudin, S.T., M T. Bogor, 07-02-1971	'197102071998031010	III/d	01/10/2014	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	01/01/2015	17	10	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	09/03/2011	285	Magister Rekayasa dan man	2008	S2	46		
14	Erni Dartini, SE Bandung, 07-05-1965	'196505071987032006	III/d	01/04/2015	Kasubag Administrasi Umum pada Inspektorat Kota Bogor	11/08/2017	25	10	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	01/11/2014	285	Universitas Ibn Khaldun Bogor	2009	S1	52		
15	Lies Setiowati, S.E. Jakarta, 28-04-1973	'197304281998032006	III/d	01/04/2016	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	01/01/2017	17	10	Diklat Kepemimpinan Tk.IV	01/06/2012	285	STIE Triguna	2006	S1	44		
16	Lilis Suliyanti, S.E , M.Si. Bogor, 20-04-1976	'197604201998032003	III/d	01/04/2016	Auditor	01/04/2016	14	10		-	0	Lainnya	2010	S2	41		
17	Ade Hendar Purnawan, S.T , M.P. Bandung , 28-05-1969	'196905282005011003	III/d	01/10/2016	Auditor	01/10/2016	22	6		-	0	Institut Pertanian Bogor	2010	S2	48		
18	Andreis Prilesmana Sukanda, S.E. Bogor , 24-04-1973	'197304242005011004	III/d	01/04/2017	Pengelola Barang Daerah	01/01/2015	12	11		-	0	Universitas Trisakti	1998	S1	44		
19	Choeriah Fitriani, S.STP. Jayapura, 04-07-1985	'198507042003122001	III/d	01/04/2017	Pengelola Kepegawaian	01/01/2015	9	0		-	0	STPDN	2007	D4	32		
20	E. Sulistiawarni, SE, Ak Bogor, 09-08-1968	'196808091997032001	III/d	01/04/2017	Auditor	01/04/2017	20	10		-	0	Unhas	1995	S1	49		

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI	KET
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	TAHUN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Ferani Miranty, S.STP, MM Palembang, 10-02-1984	'198402102003122001	III/d	01/10/2017	Pengadministrasi Keuangan	01/01/2015	9	0	Diklat PIM IV	18/05/2009	310	Universitas Bina Darma	2008	S2	33		
22	Siti Nurlaelah, SAP Jakarta, 27-03-1975	'197503271994032002	III/d	01/10/2017	Auditor	01/10/2017	18	10		-	0	STIA LAN JAKARTA	1993	S1	42		
23	Ficki Abdullah Rizki Bandung, 12-06-1974	197406121997031000	III/d	01/04/2015	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	18/05/2018			Diklat Kepemimpinan Tk.IV	03/11/2012		STIA YAPPAN	2007	S2	45		
24	Yusfa Reno Padang Panjang, 28-08-1970	'197008281993032008	III/c	01/10/2011	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	01/01/2015	22	10	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	26/11/2007	285	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer	1992	D3	47		
25	Edi Kurniadi Kosasih, ST. Tj. Karang, 22-04-1973	'197304222005011010	III/c	01/10/2013	Auditor	01/10/2013	12	11		-	0	Universitas brawijaya	1998	S1	44		
26	Budi Yulistiawan, S.T. Bogor, 04-07-1976	'197607042006041011	III/c	01/10/2016	Auditor	01/10/2016	14	11		-	0	Universitas Pakuan	2002	S1	41		
27	Mahdalena, S.E., M.Si Matang Glumpang Dua, 20-10-1982	'198210202006042006	III/c	01/10/2016	Auditor	01/10/2016	11	8		-	0	Universitas Nusa Bangsa	2013	S2	35		
28	Makmur Ridho, S.T. Banjarmasin, 26-05-1975	'197505262009021001	III/c	01/04/2017	Auditor	01/04/2017	12	2		-	0	Universitas Gadjah Mada	2000	S1	42		
29	Septi Ekariani, S.E. Bogor, 01-09-1985	'198509012009022002	III/c	01/04/2017	Auditor	01/04/2017	8	10		-	0	Universitas Pasundan	2007	S1	32		
30	Widiatmoko, S.T, M.M Wonogiri, 16-03-1975	'197503162010011009	III/c	01/10/2017	Auditor	01/10/2017	7	11		-	0	Universitas Pakuan Bogor	2016	S2	42		
31	Dewi Ekaningsih, S.E. Banjarnegara, 05-09-1975	'197509052006042016	III/b	01/04/2010	Auditor	01/04/2010	11	8		-	0	STIE YKPN	1998	S1	42		
32	Sarmudi, S.E Gunung Kidul, 23-01-1968	'196801231993031003	III/b	01/04/2013	Auditor	01/04/2013	19	10		-	0	STIE GOTONG ROYONG	2009	S1	49		
33	Dewi Lesmana, SE Bandung, 06-07-1969	'196907061997032003	III/b	01/04/2013	Auditor	01/04/2013	18	10		-	0	STIE Bina Niaga	2012	S1	48		
34	Tri Suharto, S.E. Jakarta, 16-07-1980	'198007162010011012	III/b	01/04/2014	Auditor	01/04/2014	7	11		-	0	STIE Perbanas	2005	S1	37		
35	Rizki Satrianegara, S.E. Sukabumi, 18-09-1981	'198109182010011012	III/b	01/04/2014	Auditor	01/04/2014	7	11		-	0	Universitas Pasundan	2006	S1	36		
36	Ferawaty Sitorus, S.E. Silombu Toruan, 07-08-1983	'198308072010012017	III/b	01/04/2014	Auditor	01/04/2014	7	11		-	0	Universitas Mercubuana	2008	S1	34		
37	Sisca Irma Trisiana, S.E. Bogor, 19-09-1973	'197309192003122002	III/b	01/04/2016	Auditor	01/04/2016	12	0		-	0	STIE Bina Niaga Bogor	1992	S1	44		
38	Ratih Werdiningsih Suherman, S.Pi. Bogor, 04-04-1983	'198304042015022001	III/b	01/04/2017	Auditor	01/01/2015	2	10		-	0	Institut Pertanian Bogor	2015	S1	34		
39	Mamat Rohimat, S.Sos Ciamis, 06-09-1980	'198009062008011007	III/a	01/04/2014	Auditor Kepegawaian	01/04/2014	11	11		-	0	Universitas Djuanda	2005	S1	37		
40	Purnomo Bogor, 27-08-1962	'196208271998031002	III/a	01/04/2014	Pengelola Barang Daerah	01/01/2015	14	10		-	0	SMA PGRI I BOGOR	1982	SMA/SEDE RAJAT	55		
41	Rasdi Cahyadi Jakarta, 24-03-1968	'196803241996011001	III/a	01/10/2015	Pengadministrasi Surat	01/01/2015	16	12		-	0	SMA	1995	SMA/SEDE RAJAT	49		
42	Areh Setiawati, SE Ngawi, 10-03-1978	'197803102010012011	III/a	01/10/2015	Auditor	01/10/2015	5	11		-	0	STIE Bina Niaga Bogor	2015	S1	39		
43	Bernadus Danarjati, ST Dili,Timor-Timur, 30-07-1984	'198407302015021001	III/a	01/04/2016	Auditor	01/01/2015	2	10		-	0	Universitas Sebelas Maret surakarta	2006	S1	33		
44	Supian Ardyanumbara, SE Jakarta, 18-03-1986	'198603182015021001	III/a	01/04/2016	Auditor	01/01/2015	2	10		-	0	UNIVERSITAS KRISTEN SATYAWACANA	2008	S1	31		

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			USIA	CATATAN MUTASI	KET
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	TAHUN	JUMLAH JAM	NAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45	Apriessa Seventienna, SE Cianjur, 17-04-1988	'198804172015022001	III/a	01/04/2016	Auditor	01/01/2015	2	10		-	0	Institut Pertanian Bogor	2012	S1	29		
46	Muhamad Dahlan, SE Bogor, 29-09-1983	'198309292010011001	III/a	01/10/2016	Auditor	01/01/2015	9	11		-	0	STM YZA	2002	SMA/SEDE RAJAT	34		
47	Rudy Suryadi, SE Bogor, 23-02-1978	'197802232014091001	III/a	01/04/2017	Bendaharawan Pengeluaran	01/01/2015	15	7		-	0	STIE Kesatuan	2004	S1	39		
48	Wardi Suwardi, SE Bogor, 15-01-1973	197301152008011005	III/a	01/04/2017	Pengadministrasi Umum	01/01/2015	13	5		-	0	SME GANESA BOGOR	1993	SMA/SEDE RAJAT	44		
49	Vina Mardiana Saragi, A.Md Jakarta, 15-02-1985	'198502152010012014	II/d	01/04/2014	Pengadministrasi Umum	01/01/2015	10	11		-	0	Akademi Pimpinan Perusahaan	2006	D3	32		
50	Alpian Ogan Komerling Ulu, 05-04-1965	'196504052007011018	II/c	01/04/2015	Pengadministrasi Surat	01/01/2015	16	8		-	0	SMA PGRI	1989	SMA/SEDE RAJAT	52		
51	Sutiyawati Sukabumi, 06-07-1980	'198007062008012007	II/c	01/04/2016	Pengadministrasi Umum	01/01/2015	17	8		-	0	SMU Swasta Kosgoro	1999	SMA/SEDE RAJAT	37		

### 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

#### Anggaran dan Realisasi Pelaksana Urusan Wajib Inspektorat Kota Bogor

NO	KEGIATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL ALOKASI BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG	REALISASI BELANJA LANGSUNG			BELANJA PEMELIHARAAN	REALISASI BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG	PERSENTASI (%)
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8	9	10	11	12	13 = 8+9+10+11+12	14
	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>11.399.830.958</b>	<b>251.515.000</b>	<b>2.861.450.000</b>	<b>487.670.000</b>	<b>15.000.465.958</b>	<b>11.061.307.863</b>	<b>228.420.000</b>	<b>2.211.701.271</b>	<b>394.824.200</b>	<b>140.167.273</b>	<b>14.036.420.607</b>	<b>93,57%</b>
	Belanja Tidak Langsung	11.399.830.958				11.399.830.958	11.061.307.863					11.061.307.863	97,03%
	<b>I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>												
1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD		115.710.000	484.290.000	-	600.000.000		113.170.000	421.187.298	-	-	534.357.298	89,06%
	<b>II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>												
1	Pengadaan Inventaris Kantor		12.000.000	330.000	487.670.000	500.000.000		8.000.000	-	394.824.200	-	402.824.200	80,56%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor		13.425.000	236.575.000		250.000.000		13.250.000	87.958.297	-	140.167.273	241.375.570	96,55%
	<b>III Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>												
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD		-	50.000.000	-	50.000.000		-	28.735.400	-	-	28.735.400	57,47%
2	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah		4.050.000	95.950.000	-	100.000.000		4.050.000	91.107.490	-	-	95.157.490	95,16%
	<b>IV Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>												
1	Audit Operasional ( PKPT dan Non PKPT )		20.400.000	536.500.000	-	556.900.000		20.400.000	463.421.170	-	-	483.821.170	86,88%
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)		12.000.000	215.770.000	-	227.770.000		12.000.000	147.439.537	-	-	159.439.537	70,00%
3	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK - JFA)		12.000.000	184.700.000	-	196.700.000		12.000.000	173.442.094	-	-	185.442.094	94,28%
4	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		14.030.000	135.970.000	-	150.000.000		13.600.000	105.908.525	-	-	119.508.525	79,67%
5	Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan		6.000.000	141.840.000	-	147.840.000		6.000.000	97.471.538	-	-	103.471.538	69,99%
6	Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a ke atas dan Verifikasi LHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor		5.450.000	94.550.000	-	100.000.000		4.050.000	77.961.300	-	-	82.011.300	82,01%
7	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		8.350.000	291.650.000	-	300.000.000		7.900.000	245.416.408	-	-	253.316.408	84,44%
8	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		12.800.000	124.375.000	-	137.175.000		12.000.000	79.468.468	-	-	91.468.468	66,68%
9	Sapu bersih Pungutan Liar		15.300.000	118.950.000	-	134.250.000		2.000.000	47.265.746	-	-	49.265.746	36,70%
10	Penguatan Pengawasan Pembangunan di kabupaten / Kota ( Banprop 2018 )		-	150.000.000	-	150.000.000		-	144.918.000	-	-	144.918.000	96,61%
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.399.830.958</b>	<b>251.515.000</b>	<b>2.861.450.000</b>	<b>487.670.000</b>	<b>15.000.465.958</b>	<b>11.061.307.863</b>	<b>228.420.000</b>	<b>2.211.701.271</b>	<b>394.824.200</b>	<b>140.167.273</b>	<b>14.036.420.607</b>	<b>93,57%</b>

**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD, RKPD, RENJA, RKA DAN DPA TAHUN 2018**  
**URUSAN : OTDA, PEMERINTAH UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

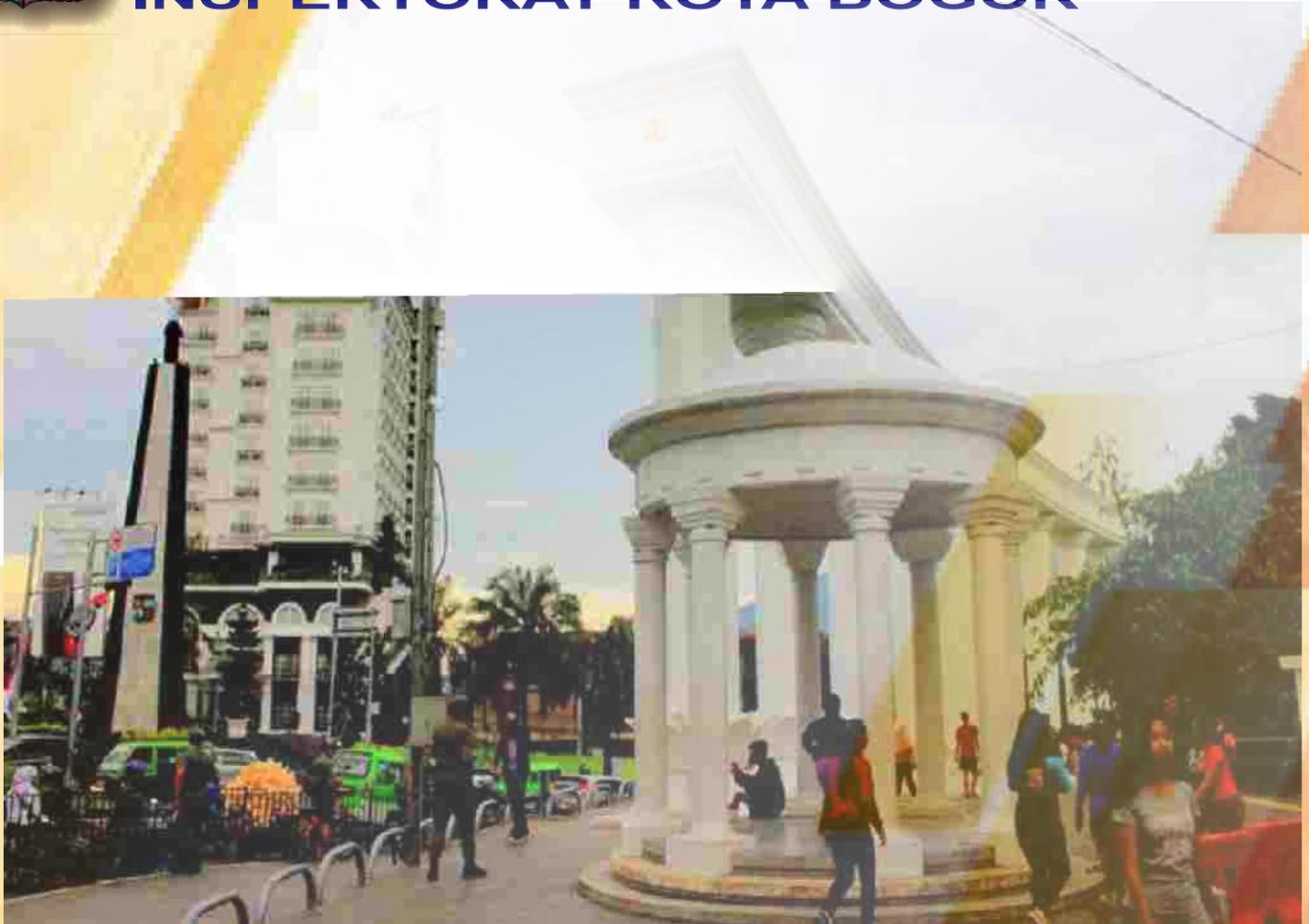
PROGRAM				
RPJMD	RKPD	RENJA	RKA	DPA
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	4 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah



**Arie Sarsono P. Diraharjo, SE, MPd**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19630408 198303 1 007



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
**LKPJ TA 2018**  
INSPEKTORAT KOTA BOGOR



**INSPEKTORAT KOTA BOGOR**

Jl. Pahlawan Blk 144, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor  
Telp. (021) 8313274, Fax. (0251) 8373229

**2018**